



This is an open access article under the CCBYSA

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
23-Juli-2025	31-Agustus-2025	19-November-2025	31-Desember-2025
DOI : https://doi.org/10.58518/alamtara.v9i1.4273			

Pesantren dalam Bayang-Bayang Hegemoni Media: Analisis Kritis atas Framing Tayangan Xpose Uncensored di Trans7 terhadap Pondok Pesantren Lirboyo

Ade Iim

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

hi.adeiim@gmail.com

Ahmad Fauzi Zainal Abidin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

afzalik561@gmail.com

Ahmad Sarbini

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

ahmadsarbini@uinsgd.ac.id

Asep Iwan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

iwanfidkom@uinsgd.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis representasi Pondok Pesantren Lirboyo dalam tayangan Xpose Uncensored di Trans7 yang memicu kontroversi di kalangan publik dan institusi keagamaan. Dengan menggunakan analisis framing dan teori hegemoni, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana media membingkai pesantren sebagai objek tontonan, serta nilai-nilai yang diproduksi melalui representasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tayangan ini menggambarkan pesantren melalui sudut pandang yang cenderung negatif dan sensasional, dengan menyoroti aspek-aspek tertentu dari kehidupan santri yang dianggap tidak biasa. Selain itu, framing media ini menciptakan dikotomi antara "modernitas" dan "tradisi pesantren", yang secara implisit merendahkan nilai-nilai spiritual yang ada dalam pesantren. Reaksi terhadap tayangan ini mencerminkan bentuk resistensi masyarakat pesantren yang mengkritisi dan menanggapi framing media melalui berbagai jalur, termasuk kampanye boikot dan intervensi hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dinamika kekuasaan dalam representasi agama di media massa, serta pentingnya literasi media dan regulasi penyiaran yang lebih sensitif terhadap keberagaman. Implikasi

praktis penelitian ini mencakup perlunya penguatan regulasi yang melindungi institusi keagamaan dari eksploitasi media.

Kata Kunci: Framing media, pesantren, hegemoni, representasi agama, resistensi

ABSTRACT: *This study analyzes the representation of Pondok Pesantren Lirboyo in the Xpose Uncensored broadcast on Trans7, which sparked controversy among the public and religious institutions. Using framing analysis and the theory of hegemony, this research aims to explore how the media frames pesantren as an object of spectacle and the values produced through such representations. The results show that the broadcast depicted pesantren from a negative and sensationalist perspective, highlighting certain aspects of the life of santri considered unusual. Moreover, the media framing created a dichotomy between "modernity" and "pesantren tradition," implicitly undermining the spiritual values within pesantren. The reactions to this broadcast reflect the resistance of the pesantren community, criticizing and responding to the media framing through various channels, including boycott campaigns and legal interventions. This study contributes to understanding the power dynamics in the representation of religion in mass media and the importance of media literacy and broadcast regulations that are more sensitive to diversity. The practical implications of this research include the need to strengthen regulations that protect religious institutions from media exploitation.*

Keywords: Media framing, pesantren, hegemony, religious representation, resistance.

PENDAHULUAN

Perkembangan media massa modern telah mengubah secara mendasar cara agama direpresentasikan dan dikonsumsi oleh publik. Media, khususnya televisi dan platform digital, tidak hanya berperan sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai agen konstruksi realitas sosial yang membentuk pemahaman masyarakat tentang nilai, moral, dan identitas keagamaan (Andriyana and Adrian 2024). Dalam konteks ini, agama tidak lagi hadir hanya di ruang ibadah atau lembaga pendidikan keagamaan, melainkan juga di ruang publik media yang diwarnai oleh logika ekonomi, hiburan, dan ideologi tertentu (Wahyuni 2017).

Di Indonesia, transformasi tersebut menghadirkan tantangan bagi institusi keagamaan tradisional seperti pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam klasik memiliki otoritas moral dan sosial yang tinggi, namun ketika tampil di

media modern sering kali terjebak dalam pola representasi yang sensasional dan stereotipikal (Fuady 2020). Media cenderung menonjolkan sisi ekstrem atau kontroversial untuk menarik perhatian publik, sehingga nilai-nilai luhur dan kompleksitas kehidupan pesantren seringkali disederhanakan atau bahkan disalahpahami (Sadali 2020).

Kasus tayangan Xpose Uncensored di Trans7 pada Oktober 2025 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana representasi media dapat menimbulkan ketegangan antara dunia media dan lembaga keagamaan. Tayangan tersebut yang menyorot Pondok Pesantren Lirboyo memicu reaksi publik luas, mulai dari munculnya tagar #BoikotTRANS7, protes dari ormas Islam, hingga sanksi resmi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara logika ekonomi-politik media dengan otoritas simbolik agama di ruang publik. Dalam konteks ini, dapat dilihat bagaimana media berfungsi sebagai arena hegemoni, di mana makna tentang agama dinegosiasikan, diperdebatkan, dan bahkan dimanipulasi (Rohmah 2025).

Dengan demikian, analisis terhadap kasus ini menjadi penting untuk memahami dinamika kekuasaan antara media dan institusi keagamaan di Indonesia. Pendekatan hegemoni (Brown 2015) dapat membantu melihat bagaimana media membentuk “persetujuan sosial” (consent) melalui representasi yang tampak netral, padahal sarat dengan kepentingan ideologis tertentu. Sementara itu, teori mediatization of religion Martino (2016) menegaskan bahwa media bukan hanya menyalurkan pesan-pesan agama, tetapi juga turut mengubah praktik dan persepsi keagamaan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji hubungan antara agama dan masyarakat di tengah hegemoni media, dengan fokus pada bagaimana wacana keagamaan diproduksi, dikonsumsi, dan dilawan dalam konteks media massa kontemporer Indonesia men.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek fundamental yang membedakannya dari kajian-kajian framing media sebelumnya. Pertama, penelitian ini menganalisis representasi pesantren dalam format program infotainment, bukan dalam konteks pemberitaan hard news, sehingga

mengungkap bagaimana logika entertainment dan sensasionalisme media televisi bekerja dalam mengkonstruksi stigma terhadap institusi keagamaan tradisional. Kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis proses framing media tetapi juga secara komprehensif memetakan mekanisme resistensi multi-jalur (digital activism, mobilisasi massa, jalur hukum, dan intervensi otoritas keagamaan) yang menunjukkan transformasi civil society Indonesia dalam era digital sebagai aktor yang mampu melawan hegemoni wacana media mainstream. Ketiga, penelitian ini mengungkap dimensi ideologis yang lebih dalam di balik framing media, yaitu kontestasi antara nilai modernisme-sekuler dengan epistemologi pesantren, yang mencerminkan pertarungan identitas dan otoritas kultural dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian framing analysis dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi politik media, teori hegemoni Gramsci, dan studi resistensi kolektif, sehingga memberikan framework analisis yang lebih holistik untuk memahami relasi kuasa antara media, negara, dan civil society dalam konteks representasi keagamaan. Implikasi praktisnya sangat signifikan bagi tiga domain: (1) Regulasi Media, penelitian ini menjadi basis argumentasi untuk penguatan regulasi penyiaran yang melindungi institusi keagamaan dari eksploitasi dan stigmatisasi, termasuk revisi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3SPS) KPI agar lebih detail mengatur konten sensitif keagamaan; (2) Pendidikan Jurnalisme, temuan penelitian ini mendesak pentingnya kurikulum media literacy dan cultural sensitivity dalam pendidikan jurnalistik untuk mencegah terulangnya framing bias terhadap kelompok minoritas atau institusi keagamaan; (3) Pemberdayaan Masyarakat, penelitian ini menunjukkan efektivitas resistensi kolektif berbasis digital dan offline, sehingga dapat menjadi model bagi komunitas lain dalam melawan misrepresentasi media, sekaligus mendorong kesadaran kritis publik bahwa audiens memiliki kekuatan untuk menuntut akuntabilitas dan keadilan representasi dalam ekosistem media Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana program Xpose Uncensored (Trans7) membingkai (framing) Pondok Pesantren Lirboyo dan figur kiyai dalam tayangannya. Mengidentifikasi Ideologi atau nilai

apa yang direproduksi melalui framing tersebut dan kepentingan siapa yang diuntungkan oleh narasi itu. Menganalisis bentuk-bentuk reaksi masyarakat pesantren (santri, alumni, organisasi agama) berfungsi sebagai bentuk resistensi atau counter-hegemony terhadap representasi media.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang berfokus pada relasi antara Pondok Pesantren Lirboyo dan tayangan Xpose Uncensored di Trans7. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap konteks sosial, wacana, serta relasi kuasa yang terlibat dalam kasus tersebut (Miles, Huberman, and Saldaña 2014; Yin 2018).

Metode utama yang digunakan adalah Critical Discourse Analysis Fairclough (2023), yang bertujuan untuk mengungkap struktur ideologis dalam teks dan praktik diskursif media. Analisis ini dilengkapi dengan framing analysis untuk menelusuri strategi seleksi, penonjolan, dan pembingkaihan isu oleh media, serta model encoding-decoding untuk memahami bagaimana pesan media diinterpretasikan oleh khalayak dengan posisi pembacaan yang beragam—dominant, negotiated, atau oppositional. Sumber data penelitian mencakup rekaman tayangan Trans7, artikel berita dari media nasional seperti Detik, The Jakarta Post, Tirto, dan Media Indonesia, serta pernyataan resmi KPI dan unggahan media sosial dengan tagar #BoikotTRANS7.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi tayangan, pengarsipan artikel berita, dan observasi konten digital, sementara validitas hasil diperkuat melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi temuan antarjenis data (Denzin and Giardina 2012). Kombinasi metode ini memungkinkan penelitian menyingkap bagaimana representasi pesantren dibentuk, didistribusikan, dan ditantang di ruang publik media modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Framing Tayangan Xpose Uncensored terhadap Pesantren Lirboyo dan Figur Kiai

Berdasarkan analisis framing model Entman terhadap tayangan Xpose Uncensored yang ditayangkan pada 13 Oktober 2025, program ini mendefinisikan tradisi pesantren sebagai sebuah masalah dengan mempertanyakan praktik penghormatan santri kepada kiai. Hal ini terlihat dari pemilihan judul yang provokatif "Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan Pondok?" serta narasi yang menyoroti aspek penghormatan santri sebagai sesuatu yang berlebihan. Tayangan ini mendiagnosis penyebab permasalahan dengan menempatkan struktur hierarki dalam pesantren dan figur kiai sebagai akar dari praktik yang dianggap tidak lazim tersebut. Framing ini mengkonstruksi realitas pesantren melalui sudut pandang yang skeptis terhadap tradisi ta'dzim (penghormatan) kepada ulama, yang sejatinya merupakan bagian integral dari sistem nilai dan adab dalam tradisi pendidikan Islam pesantren. Pemilihan angle "kehidupan pondok yang tidak biasa" menunjukkan bahwa media menempatkan budaya pesantren sebagai objek eksotis yang perlu dipertanyakan, bukan sebagai sistem nilai yang memiliki landasan filosofis dan historis yang kuat dalam konteks pendidikan Islam Nusantara.

Dalam dimensi penilaian moral, tayangan Xpose Uncensored melakukan framing negatif terhadap figur kiai dan sistem nilai pesantren dengan menggunakan diksi yang bermuatan stigma seperti "kiai yang kaya raya, tapi umat yang kasih amplop" dan menyoroti praktik penghormatan dengan nada satir yang merendahkan. Media positioning ini menciptakan evaluasi moral bahwa praktik penghormatan dalam pesantren adalah bentuk subordinasi yang tidak sehat, sehingga figur kiai secara implisit digambarkan sebagai pihak yang mendapat keuntungan dari sistem tersebut. Framing semacam ini mengabaikan konteks kultural dan spiritual di mana tradisi ta'dzim kepada kiai merupakan manifestasi dari nilai-nilai seperti tawadhu' (rendah hati), akhlaq (etika), dan penghormatan terhadap ilmu. Lebih jauh, tayangan ini juga mengkonstruksi dikotomi antara "modernitas" dan "tradisi pesantren", di mana praktik pesantren diposisikan sebagai sesuatu yang tertinggal dan perlu dipertanyakan relevansinya. Penilaian moral semacam ini menimbulkan dampak stigmatisasi terhadap pesantren dan

kiai, sebagaimana terlihat dari reaksi keras dari PBNU, alumni Lirboyo, dan berbagai elemen masyarakat yang merasa nilai-nilai luhur pesantren telah dilecehkan melalui narasi media yang bias dan tidak berimbang.

Dari aspek rekomendasi penyelesaian masalah, tayangan Xpose Uncensored tidak menawarkan solusi konstruktif melainkan cenderung menciptakan problem framing yang bersifat stigmatisasi. Absennya perspektif dari pihak pesantren, kiai, atau akademisi yang memahami tradisi pesantren menunjukkan bahwa media tidak bermaksud memberikan pencerahan edukatif, melainkan mengemas konten dengan pendekatan sensasionalisme untuk menarik rating. Implikasi dari framing negatif ini sangat signifikan, terbukti dari respons masif berupa gerakan boikot Trans7, kecaman dari PBNU, sanksi penghentian sementara program oleh KPI, serta tuntutan hukum dari berbagai pihak. Framing media yang bias terhadap pesantren dan figur kiai ini mencerminkan lemahnya pemahaman jurnalistik terhadap nilai-nilai keberagaman dan etika penyiaran, khususnya dalam mengangkat isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama dan lembaga pendidikan tradisional. Kasus ini menegaskan pentingnya media literacy dan tanggung jawab sosial media dalam membongkar realitas sosial, terutama ketika berhadapan dengan institusi yang memiliki kontribusi historis dan kultural yang signifikan bagi bangsa seperti pesantren. Ke depan, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pendidikan jurnalisme yang sensitif terhadap keberagaman untuk mencegah terjadinya framing yang berpotensi merusak harmoni sosial dan martabat lembaga pendidikan keagamaan (Mualifah 2022).

Hasil analisis menunjukkan bahwa program Xpose Uncensored (Trans7) membongkar Pondok Pesantren Lirboyo dan figur kiai melalui tiga strategi framing utama:

1. Pertama, frame sensasionalisasi yang tampak melalui pemilihan diksi hiperbolis dan penggunaan potongan gambar yang mempertegas aspek "aneh" atau "tidak biasa" dari kehidupan santri. Strategi ini berfungsi meningkatkan nilai jual tayangan dalam logika industri penyiaran yang mengejar rating dan atensi publik.

2. Kedua, frame eksotifikasi dan objektifikasi yang tampak dari cara pesantren digambarkan sebagai objek tontonan, bukan sebagai lembaga pendidikan Islam yang kompleks dan dinamis. Pilihan visual menekankan simbol-simbol tradisional seperti pakaian santri, ruang ngaji, atau aktivitas malam hari tanpa konteks sosio-historisnya.
3. Ketiga, frame personalisasi yang muncul melalui fokus berlebihan pada figur kiai sebagai individu dengan karakter tertentu, alih-alih menampilkan perannya sebagai pemimpin spiritual dan sosial dalam komunitas pesantren.

Ideologi yang Direproduksi dan Kepentingan yang Diuntungkan

Tayangan Xpose Uncensored secara implisit mereproduksi ideologi modernisme-sekuler yang menempatkan nilai-nilai rasionalitas modern sebagai standar tunggal dalam menilai praktik sosial-keagamaan. Framing yang mempertanyakan tradisi penghormatan santri kepada kiai mencerminkan worldview sekuler yang cenderung melihat relasi guru-murid dalam pesantren sebagai bentuk feodalisme, bukan sebagai sistem transmisi ilmu dan nilai spiritual yang memiliki epistemologi sendiri. Ideologi ini mereproduksi dikotomi antara "tradisi yang kolot" versus "modernitas yang progresif", di mana pesantren diposisikan sebagai institusi yang perlu direformasi atau bahkan ditinggalkan. Lebih jauh, tayangan ini juga mereproduksi ideologi konsumerisme media yang mengemas isu sensitif menjadi komoditas tontonan sensasional tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kultural. Narasi yang menyinggung aspek ekonomi ("kiai kaya raya, umat kasih amplop") juga mencerminkan penetrasi logika kapitalisme yang mereduksi relasi spiritual menjadi transaksi material semata, mengabaikan konsep barokah, sedekah, dan ekonomi berbasis keberkahan yang menjadi nilai fundamental dalam tradisi pesantren.

Dari perspektif ekonomi politik media, tayangan Xpose Uncensored menguntungkan kepentingan industri televisi yang berorientasi pada rating dan iklan. Program infotainment seperti Xpose mengandalkan konten sensasional dan kontroversial untuk menarik perhatian audiens, yang kemudian diterjemahkan menjadi nilai ekonomi melalui iklan dan sponsorship. Dalam konteks ini, Pesantren

Lirboyo dan figur kiai dijadikan objek eksploitasi untuk menciptakan "buzz" dan meningkatkan viewership, tanpa mempertimbangkan akurasi informasi dan dampak stigmatisasi yang ditimbulkan. Kepentingan ekonomi ini terbukti dari format penyajian yang mengutamakan angle provokatif dan clickbait daripada jurnalisme investigatif yang mendalam dan berimbang. Selain itu, framing negatif terhadap pesantren juga dapat menguntungkan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki agenda melemahkan pengaruh ulama dan institusi pesantren dalam kehidupan sosial-politik Indonesia (Dwyer, Crawford, and Zeller 2023). Pesantren, khususnya yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama seperti Lirboyo, memiliki basis massa yang besar dan pengaruh politik yang signifikan, sehingga delegitimasi terhadap figur kiai dan sistem pesantren dapat dipandang sebagai upaya melemahkan kekuatan sosial-politik kelompok Islam tradisional.

Tayangan Xpose Uncensored merepresentasikan kontestasi kekuasaan simbolik dalam ruang publik Indonesia, di mana media massa berupaya menjadi pihak yang mendefinisikan "normalitas" dan "kebenaran" sosial. Dengan mempertanyakan tradisi pesantren melalui frame yang bias, media secara tidak langsung melakukan proses hegemoni wacana yang berusaha menggeser otoritas kultural dari ulama dan pesantren kepada institusi media sekuler. Ini mencerminkan pertarungan ideologis antara nilai-nilai tradisional-keagamaan dengan nilai-nilai liberal-sekuler dalam mendefinisikan identitas dan moralitas publik Indonesia. Kepentingan yang diuntungkan dari hegemoni wacana ini adalah kelompok yang menginginkan sekularisasi ruang publik dan marginalisasi peran agama dalam kehidupan sosial. Namun demikian, respons masif dari komunitas pesantren, PBNU, dan masyarakat Muslim terhadap tayangan ini menunjukkan bahwa upaya hegemoni tersebut mengalami resistensi kuat. Kasus ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya komunitas Muslim, masih memiliki kesadaran kritis terhadap upaya-upaya delegitimasi nilai-nilai keagamaan melalui framing media. Implikasi lebih luas dari kasus ini adalah pentingnya demokratisasi media dan perlunya regulasi yang melindungi kelompok minoritas dan institusi

keagamaan dari eksploitasi dan stigmatisasi media yang dapat mengancam harmoni sosial dan kebhinekaan Indonesia

Analisis kritis terhadap isi tayangan mengidentifikasi sejumlah ideologi yang direproduksi melalui framing tersebut Pertama, ideologi sekular-komersial tampak dalam cara tayangan menempatkan agama sebagai sumber hiburan, bukan sebagai nilai moral atau spiritual yang harus dihormati. Agama ditampilkan dalam kerangka entertainment yang tunduk pada logika komodifikasi media. Kedua, orientalisme domestik di mana pesantren diposisikan sebagai entitas tradisional dan tertinggal dibandingkan dunia modern perkotaan. Hal ini serupa dengan konsep othering yang dijelaskan Stuart Hall, di mana kelompok tertentu direpresentasikan sebagai "berbeda" dan "kurang rasional" dibandingkan norma dominan. Ketiga, individualisasi wacana dengan menekankan perilaku personal kiai dan santri, bukan struktur sosial dan nilai pendidikan Islam yang lebih luas.

Kepentingan yang diuntungkan adalah industri media yang mengutamakan nilai komersial dan daya tarik penonton di atas keakuratan serta kepekaan sosial. Dalam perspektif Gramsci, media bertindak sebagai alat hegemoni yang menginternalisasi nilai-nilai dominan dalam kesadaran kolektif audiens tanpa paksaan eksplisit, sementara institusi keagamaan tradisional seperti pesantren dirugikan legitimasi sosialnya

Resistensi dan Counter-Hegemony Masyarakat Pesantren

Hasil penelitian menemukan bahwa reaksi masyarakat pesantren berfungsi sebagai bentuk resistensi atau counter-hegemony terhadap representasi media melalui beberapa manifestasi Pertama, aksi simbolik digital melalui kampanye tagar #BoikotTRANS7 yang menjadi trending topic nasional selama beberapa hari. Kelompok pesantren, alumni, dan masyarakat keagamaan menampilkan pembacaan oposisi (oppositional reading) dengan menolak wacana media secara aktif. Kedua, advokasi kelembagaan melalui pernyataan resmi PBNU dan lembaga pesantren yang meminta klarifikasi langsung kepada pihak Trans7, serta mengajukan tuntutan etik kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ketiga, tekanan regulatif yang berhasil mendorong KPI menjatuhkan sanksi administratif

kepada program tersebut karena melanggar etika penyiaran dan prinsip penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Pihak Trans7 juga akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

.Respons cepat dan masif dari komunitas pesantren terhadap tayangan Xpose Uncensored menunjukkan kapasitas resistensi kolektif yang terorganisir dalam menghadapi hegemoni wacana media mainstream. Mobilisasi dimulai dari ruang digital dengan munculnya tagar #BoikotTrans7 yang viral di berbagai platform media sosial, mencerminkan penggunaan teknologi komunikasi sebagai instrumen counter-hegemony. Gerakan boikot ini bukan sekadar reaksi emosional, melainkan bentuk resistensi ekonomi yang strategis dengan menyasar aspek komersial stasiun televisi melalui penurunan rating dan tekanan kepada pengiklan. Alumni Pesantren Lirboyo dari berbagai wilayah, termasuk Jabodetabek, melakukan aksi demonstrasi ke kantor Trans7 dan menuntut pertanggungjawaban langsung dari pihak manajemen, narator, dan rumah produksi. Resistensi ini juga melibatkan jalur hukum dengan keterlibatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menyatakan tayangan tersebut melanggar etika penyiaran dan berpotensi melanggar UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang melindungi pesantren sebagai lembaga sosial-keagamaan. Strategi multi-jalur ini—media sosial, aksi lapangan, dan hukum—menunjukkan sophisticated resistance yang tidak hanya reaktif tetapi juga terstruktur dan memiliki basis legal yang kuat.

Dalam perspektif Gramscian, respons kolektif ini merupakan bentuk counter-hegemony di mana kelompok subaltern (komunitas pesantren) berhasil menegosiasikan ulang makna dan menantang dominasi wacana media. Proses resistensi ini menunjukkan bahwa audiens bukan penerima pasif, melainkan aktor aktif dalam pembentukan makna dan perjuangan ideologis di ruang publik digital (Attar and King 2023). Dinamika antara framing media dan resistensi publik memperlihatkan bahwa ruang publik digital dan regulatif masih berfungsi sebagai arena negosiasi makna dan kekuasaan dalam representasi agama di media massa Indonesia

Keterlibatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui pernyataan resmi Ketua Umum Yahya Cholil Staquf yang menyatakan ketersinggungannya merepresentasikan mobilisasi otoritas keagamaan sebagai kekuatan counter-hegemony. PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan puluhan juta anggota menggunakan modal simboliknya untuk melawan narasi media yang delegitimatif terhadap pesantren. Counter-narrative yang dibangun menekankan nilai historis pesantren dalam perjuangan kemerdekaan (seperti peran santri Lirboyong dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya), kontribusi pendidikan moral bangsa, dan sistem nilai ta'dzim yang memiliki landasan teologis dan kultural yang kokoh. Konsolidasi ini juga melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti GP Ansor, IKLAS (Ikatan Keluarga Alumni), dan jaringan pesantren se-Indonesia yang secara serentak menyuarakan penolakan terhadap stigmatisasi media. Strategi counter-hegemony ini efektif karena berhasil menggeser wacana publik dari "mempertanyakan tradisi pesantren" menjadi "mempertanyakan etika dan tanggung jawab media", sehingga Trans7 yang semula berada dalam posisi sebagai pihak yang mempertanyakan justru menjadi pihak yang dipertanyakan dan harus mempertanggungjawabkan kontennya.

Keberhasilan resistensi komunitas pesantren yang berujung pada sanksi KPI berupa penghentian sementara program Xpose Uncensored, permintaan maaf resmi Trans7, dan pemutusan kerja sama dengan rumah produksi menunjukkan efektivitas civil society dalam mengontrol kekuasaan media. Kasus ini menjadi preseden penting dalam diskursus demokratisasi media di Indonesia, di mana audiens tidak lagi berposisi pasif tetapi memiliki agency untuk menuntut akuntabilitas dan keadilan representasi dalam media massa. Resistensi ini juga menandai reposisi otoritas kultural dalam ruang publik Indonesia, di mana pesantren dan ulama berhasil mempertahankan legitimasi dan kehormatan simboliknya di hadapan upaya delegitimasi media sekuler. Lebih jauh, kasus ini memicu kesadaran kolektif tentang pentingnya media literacy dan etika penyiaran, terutama dalam konteks masyarakat multikultural dan plural seperti Indonesia di mana isu keagamaan sangat sensitif. Agenda yang dihasilkan dari resistensi ini

mencakup tuntutan untuk klarifikasi dan liputan rehabilitatif yang sepadan dari Trans7, evaluasi etik oleh Dewan Pers, serta diskusi di tingkat DPR yang menghadirkan berbagai stakeholder termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Implikasi jangka panjang dari resistensi ini adalah terbentuknya kesadaran kritis di kalangan produser media untuk lebih sensitif dan bertanggung jawab dalam membingkai isu-isu keagamaan, serta penguatan posisi tawar institusi keagamaan dalam negosiasi representasi simbolik di ruang publik Indonesia. Kasus Xpose Uncensored vs Pesantren Lirboyo pada akhirnya bukan hanya tentang sebuah tayangan televisi yang kontroversial, tetapi merepresentasikan dinamika kontestasi ideologi, kekuasaan simbolik, dan perjuangan untuk mendefinisikan nilai-nilai yang legitimate dalam masyarakat Indonesia kontemporer

KESIMPULAN

Ketiga temuan di atas menunjukkan adanya benturan antara logika ekonomi-politik media dengan otoritas simbolik agama di ruang publik Indonesia. Tayangan Xpose Uncensored mereproduksi hegemoni media melalui framing sensasional dan ideologi sekular-komersial, namun masyarakat pesantren tidak tinggal diam dan mampu membangun gerakan counter-hegemony yang efektif melalui mobilisasi digital, advokasi kelembagaan, dan tekanan regulatif. Kasus ini menegaskan pentingnya literasi media kritis dan sinergi antara lembaga keagamaan, regulator, dan masyarakat sipil dalam menjaga representasi yang adil dan bermartabat atas institusi keagamaan di media massa

BIBLIOGRAFI

- Andriyana, Putri, and Bob Adrian. 2024. "Agama, Media, Dan Masyarakat Di Era Digital." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 4(2):85-95.
- Attar, Dalia, and Gretchen King. 2023. "Media Framing of the Intifada of the Knives." *Media, War & Conflict* 16(4):563-81.
- Brown, Trent. 2015. "Gramsci Dan Hegemoni."
- Denzin, Norman K., and Michael D. Giardina. 2012. *Qualitative Inquiry and the Politics of Advocacy*. Vol. 7. Left Coast Press.
- Dwyer, Lauren, Charlotte Crawford, and Frauke Zeller. 2023. "Media Framing of Dominant Ideologies in Explanatory Journalism Concerning Artificial

- Intelligence and Robotics." *Canadian Journal of Communication* 48(4):715–42.
- Fairclough, Norman. 2023. "Critical Discourse Analysis." Pp. 11–22 in *The Routledge handbook of discourse analysis*. Routledge.
- Fuady, Ahmad Syauqi. 2020. "Pembaharuan Sistem Pendidikan Di Pesantren." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 6(1):101–14.
- Martino, Luís Mauro Sá. 2016. *The Mediatization of Religion: When Faith Rocks*. Routledge.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd."
- Mualifah, Aniqotul. 2022. "Framing Berita Penistaan Agama Pada Kasus Ceramah Muhammad Kace Di Media Detik. Com: Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan M. Gerald Kosicki." *Gerald Kosicki. UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Rohmah, Siti. 2025. *Komunikasi Politik 5.0: Strategi, Media, Dan Pengaruh Publik*. CV Eureka Media Aksara.
- Sadali, Sadali. 2020. "Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam." *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1(2):53–70.
- Wahyuni, Dwi. 2017. "Agama Sebagai Media Dan Media Sebagai Agama." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 18(2).
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications*. Vol. 6. Sage Thousand Oaks, CA.